

## Pemberitaan Politik Dinasti Presiden Jokowi Pada Pemilihan Presiden 2024 Di Media *Online Tempo.Co* Dan *Tvonenews.Com* (Analisis *Framing* Robert Mathew Entman)

Nurul Eka Oktalisa<sup>1</sup>; Belli Nasution<sup>2</sup>; Muchid<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Riau

Email: [nurul.eka6800@grad.unri.ac.id](mailto:nurul.eka6800@grad.unri.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini didasari isu politik dinasti yang muncul saat Presiden Joko Widodo memimpin, dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi sebagai Wali Kota Solo 2020, memicu spekulasi politik dinasti dan upaya mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua media daring *tempo.co* dan *tvonenews.com* dalam membingkai berita sebelum menyajikannya kepada publik dan menemukan komodifikasi dalam pemberitaan politik dinasti Jokowi pada Pemilihan Presiden 2024. Metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan model *framing* Robert Mathew Entman dan Komodifikasi Vincent Mosco. Hasil analisis penelitian menemukan bahwa *framing* dan komodifikasi media daring *tempo.co* dan *tvonenews.com* berbeda secara signifikan dalam mengemas dan memberitakan berita politik dinasti Jokowi pada Pilpres 2024. *Framing Tempo.co* lebih menitikberatkan pada dampak sosial dan etika politik dinasti, dengan penekanan pada kritik terhadap nepotisme dan dampak negatif yang mungkin timbul bagi masyarakat dalam negara demokrasi. Di sisi lain, *framing tvonenews.com* lebih menitikberatkan pada aspek politik praktis, termasuk langkah pencalonan Gibran dan memberi kesan bahwa isu politik dinasti adalah hal yang lumrah dan tidak perlu dipermasalahkan. Komodifikasi *tempo.co* lebih menitikberatkan pada kualitas konten dan analisis yang mendalam serta kritis. Sementara komodifikasi *tvonenews.com* lebih menitikberatkan pada berita yang cepat dan sensasional untuk menarik perhatian secara instan.

**Kata Kunci:** Politik Dinasti, *Framing*, Komodifikasi, Media Online

### Abstract

*This research is based on the issue of dynasty politics that emerged when President Joko Widodo was in power, with Gibran Rakabuming Raka, Jokowi's son as Mayor of Solo 2020, triggering speculation of dynasty politics and efforts to run as Vice President 2024. This study aims to analyze two online media, tempo.co and tvonenews.com, in framing news before presenting it to the public and finding commodification in reporting on Jokowi's dynasty politics in the*

*2024 Presidential Election. The qualitative research method with data analysis techniques uses the Robert Mathew Entman framing model and Vincent Mosco's Commodification. The results of the research analysis found that the framing and commodification of online media, tempo.co and tvonenews.com, differ significantly in packaging and reporting news about Jokowi's dynasty politics in the 2024 Presidential Election. Tempo.co's framing focuses more on the social and ethical impacts of dynasty politics, with an emphasis on criticism of nepotism and the negative impacts that may arise for society in a democratic country. On the other hand, tvonenews.com framing focuses more on practical political aspects, including Gibran's candidacy steps and gives the impression that the issue of dynasty politics is commonplace and does not need to be a problem. Tempo.co's commodification focuses more on the quality of content and in-depth and critical analysis. While tvonenews.com's commodification focuses more on fast and sensational news to attract instant attention.*

**Keywords:** *Dynasty Politics, Framing, Commodification, Online Media*

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat di era digital saat ini menjadikan media massa sebagai faktor krusial dalam membentuk pandangan dan opini publik terkait kekuasaan serta isu-isu politik. Media massa, baik dalam bentuk *online (new media)* maupun cetak merupakan salah satu sumber utama informasi politik bagi masyarakat (Lim, 2017). Kemajuan teknologi melahirkan jurnalistik maju, berupa penulisan dan elektronika. Kegiatan mengolah, mengumpulkan dan menyebarkan berita kepada audiens secara luas serta cepat dengan mempergunakan radio juga televisi (kini menggunakan internet/*media online*). Perkembangan wadah dari jurnalistik ini berjalan secara berevolusi. Mula-mula dalam bentuk surat kabar, kemudian majalah yang tercetak kemudian abad ke-20 ditandai dengan perkembangan media elektronika radio dan televisi kemudian abad ke-21 muncul *media online/internet* (Komala, 2009).

*Media online* memiliki karakteristik terbuka, yang berarti pesan yang disampaikan tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat. Dengan adanya *media online*, pemilik media dapat dengan cepat menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa kepada publik melalui berita yang dipublikasikan di *platform* tersebut (Romli, 2016). *Media online* telah menjadi sarana penting bagi partai politik, kandidat, dan pemilih untuk berinteraksi dan memengaruhi opini publik. Dalam konteks pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dinamika antara media, politik, dan kekuasaan menjadi semakin kompleks dengan munculnya isu "politik dinasti".

Fenomena "politik dinasti" sendiri bukanlah hal baru di Indonesia, beberapa kepala daerah dan politikus di Indonesia telah dituding membangun politik dinasti dengan menempatkan anggota keluarga mereka pada posisi-posisi strategis. Kajian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dan Umaimah Wahid

(2021) tentang politik dinasti pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Solo. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya oligarki kekuasaan dan berkurangnya kompetisi politik yang sehat (Mietzner, 2015). Isu politik dinasti yang sedang hangat dibicarakan saat ini yakni pada masa politik kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satu tokoh sentral dalam isu politik dinasti di Indonesia ialah Gibran Rakabuming Raka, anak pertama Joko Widodo, terpilih sebagai Walikota Solo pada tahun 2020 lalu. Keberhasilan Gibran memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo memicu spekulasi dan perdebatan mengenai kemungkinan adanya upaya membangun "politik dinasti" Jokowi dan bahkan dipersiapkan untuk menjadi Wakil Presiden dalam Pilpres 2024.

Menurut Dirk Tomsa (2018) dalam sistem politik Indonesia, posisi Wakil Presiden memiliki peran strategis sebagai pendamping dan cadangan kepemimpinan Presiden. Oleh karena itu, pemilihan wakil Presiden kini menjadi perhatian publik, dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, dianggap memiliki peluang signifikan untuk menjadi salah satu calon wakil Presiden dalam pemilihan umum (Pilpres) 2024, terutama di tengah spekulasi yang berkembang saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, buku ketiga yang membahas pelaksanaan Pemilu, Bab II mengatur peserta dan syarat mengikuti pemilu. Di bagian pertama, dijelaskan persyaratan bagi calon Presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres), di mana Pasal 169 mencantumkan syarat-syarat untuk menjadi Wakil Presiden di Indonesia (Sholahuddin et al., 2019).

Pada tahun 2023, terjadi perubahan pada undang-undang tersebut, khususnya di pasal 169 ayat (q). Kalimat yang awalnya menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" diubah menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah." Dalam hal ini, istilah "kepala daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota" merujuk pada jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua posisi yang diisi melalui pemilihan umum merupakan kepala daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota (Melelo, 2023).

Perubahan persyaratan ini menimbulkan spekulasi lebih kuat dimana setelah berhasilnya Gibran menjadi Walikota Solo kemudian dalam waktu yang bisa dikatakan singkat Gibran mampu lolos dari pencalonan sebagai Wakil Presiden sehingga resmi menjadi Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024. Sebagai anak orang nomor satu di Indonesia yakni Presiden Jokowi, Gibran dianggap memiliki pengalaman kepemimpinan yang cukup, serta kemampuan komunikasi dan popularitas yang baik di kalangan masyarakat. Namun, isu "politik dinasti" yang melekat pada Gibran juga menjadi sorotan. Beberapa pengamat berpendapat bahwa perubahan persyaratan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk "membuka jalan" bagi Gibran untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan serta dianggap sebagai

bagian dari strategi Jokowi untuk memperkuat pengaruh politiknya dan mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa mendatang. Hal tersebut membuat perhatian publik, serta menjadi bahan pemberitaan di berbagai media.

Pemberitaan terkait isu politik dinasti Presiden Jokowi mulai memuncak pada tanggal 15-28 Oktober 2023 *survei* berdasarkan *google trends*. Dalam konteks ini, situs berita *tempo.co* dan *tvonenews.com* menjadi dua dari sepuluh *platform* berita yang sangat populer dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam memberikan informasi politik kepada masyarakat. Menurut Putri (2022) *tempo.co* adalah portal berita yang menyediakan informasi dengan pendekatan penulisan yang kritis terhadap berbagai peristiwa. Di sisi lain, *tvonenews.com* tetap mengutamakan fakta dalam setiap tulisannya, didukung oleh kutipan sumber yang jelas untuk memperkuat isi berita (Pangeran Siagian & Mara Untung Ritonga, 2024). Dengan memilih kedua *media online* tersebut, peneliti akan mendapatkan perspektif yang beragam dan melihat bagaimana politik dinasti Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 diangkat, diinterpretasikan, diinformasikan dan dipersepsikan.

Hubungan antara ekonomi politik media telah lama menjadi fokus kajian di berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu komunikasi dan ilmu politik. Media mempunyai peran strategis yang dapat memengaruhi persepsi dan membentuk opini publik pada isu-isu politik. Di sisi lain, kelompok-kelompok politik yang berkuasa juga berupaya untuk mengendalikan atau memengaruhi pemberitaan media demi kepentingan politik mereka (Aspinall & Mietzner, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *framing* atau penyajian berita terkait politik dinasti Presiden Jokowi pada pemilihan Presiden 2024 di situs berita *online tempo.co* dan *tvonenews.com*. *Framing* adalah proses penekanan dan pemilihan aspek-aspek tertentu dalam penyajian berita yang dapat memengaruhi persepsi dan interpretasi pembaca (Eriyanto, 2020). Penelitian ini penting karena politik dinasti memiliki dampak yang signifikan dalam konteks demokrasi dan pengambilan keputusan politik. Melalui analisis *framing* pada dua *media online* terkemuka, studi ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana politik dinasti dipresentasikan oleh media dan dampaknya terhadap proses demokrasi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, analisis *framing* model Robert Mathew Entman dan teori ekonomi politik media (komodifikasi) Vincent Mosco digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari cara situs berita *media online* dalam kajian ini *tempo.co* dan situs berita *online tvonenews.com* guna menemukan bagaimana kedua situs berita *online* tersebut membingkai atau mem-*framing* sebuah berita sebelum disajikan kepada publik serta menemukan ekonomi politik media (komodifikasi).

## KERANGKA TEORI

### *Framing Model Robert Mathew Entman*

Robert Mathew Entman (1993) menjelaskan terdapat dua aspek yang sangat penting dari *framing* yakni pengutamaan atau penekanan pada aspek tertentu dari suatu isu/realitas serta pemilihan isu. *Framing* atau pembedaan merupakan sebuah pisau analisis guna menemukan bagaimana cara pandang atau perspektif yang dikonsumsi oleh jurnalis saat menyusun berita dan memilih isu. Sudut pandang tersebut pada akhirnya akan memengaruhi arah berita yang disajikan, fakta mana yang akan diangkat, serta elemen mana yang akan diabaikan atau ditonjolkan. Dalam pandangan Entman, pembedaan pada dasarnya berkaitan dengan penyediaan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu diskursus untuk menegaskan kerangka pemikiran tertentu mengenai peristiwa yang sedang dibahas (Eriyanto, 2020). Robert Mathew Entman merumuskan konsep *framing*-nya kedalam model yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1 Konsep Analisis *Framing Model Robert Mathew Entman*

Konsep	Isi
<i>Define problem</i> (pendefinisian masalah)	Sebagai apa suatu peristiwa/isu dilihat? Dalam bentuk apa? Masalah yang bagaimana?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi? Hal apa yang dianggap sebagai penyebab masalah? Siapa (aktor) yang dipersepsikan sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai-nilai moral apa yang dipaparkan untuk mendeskripsikan masalah? Nilai-nilai moral apa yang dipergunakan untuk menyatakan legitimasi atau sebaliknya mendelegitimasi suatu perbuatan?
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu tersebut? Langkah apa yang ditawarkan dan perlu diambil untuk memecahkan masalah tersebut?

Sumber: Eriyanto (2020)

### Teori Ekonomi Politik Media

Vincent Mosco adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ekonomi politik media. Mosco menekankan bahwa media sering kali berfungsi untuk memperkuat kekuasaan yang ada, baik itu dari pemerintah, korporasi, atau elit sosial. Media dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan ideologi dominan dan mengabaikan suara-suara yang terpinggirkan. Dalam konteks ini, media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga ikut membentuknya. Terdapat tiga konsep utama dalam pemikiran ekonomi politik media yang diungkapkan oleh (Mosco, 2019), yaitu: (a) Komodifikasi (*commodification*), (b) Spasialisasi (*spatialization*), dan (c) Strukturasi (*structuration*). spesifiknya salah satu cara untuk dapat

memahami studi ekonomi politik media adalah komodifikasi (Fianto & Qorib, 2022). Komodifikasi adalah pintu masuk untuk memahami komunikasi tertentu institusi dan praktik. Ekonomi politik komunikasi terkenal karena penekanannya mengkaji pentingnya institusi, khususnya dunia usaha dan pemerintah bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan pertukaran komunikasi komoditas dan untuk regulasi pasar komunikasi (Mosco, 2019). Vincent Mosco merumuskan konsep ekonomi politik media (bentuk komodifikasi) yang penulis susun pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Konsep Komodifikasi Vincent Mosco

Konsep	Isi
Komodifikasi isi/ <i>content</i>	Proses mengubah pesan dan data-data ke dalam sistem makna sehingga menjadi produk yang dapat dipasarkan.
Komodifikasi khalayak/ <i>audiens</i>	Proses media menghasilkan khalayak sehingga dapat diserahkan kepada pengiklan.
Komodifikasi pekerja/tenaga kerja	Proses pemanfaatan pekerja sebagai penggerak kegiatan produksi dan distribusi untuk menghasilkan komoditas barang dan jasa.

Sumber: Mosco (2019)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan format deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Deddy Mulyana (2016) adalah tipe penelitian yang tidak bergantung pada bukti matematis, prinsip numerik, atau teknik statistik. Format deskriptif kualitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang berbentuk studi kasus. Metode deskriptif kualitatif dengan format studi kasus tidak bersifat layaknya air (penyebaran ke permukaan), melainkan berfokus pada unit spesifik dari beragam fenomena (Bungin, 2015). Peneliti akan mendapatkan data tertulis berupa analisis deskriptif yang terfokus dan dapat memberikan penjelasan terkait pembingkaihan serta komodifikasi terhadap teks berita melalui cara media mengkonstruksi berita. Lokasi pada penelitian ini adalah menerapkan metode pengamatan berita di situs *media online* yakni *tempo.co* dan *tvonenews.com*. Subjek yang diteliti adalah berita yang terdapat di *media online tempo.co* dan *tvonenews.com* yang memberitakan tentang politik dinasti Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 dengan analisis *framing* Robert Mathew Entman dan teori ekonomi politik media (komodifikasi) Vincent Mosco.

Menurut (Sugiyono, 2018) teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan utama dari pengumpulan data adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, sehingga penulis harus memperhatikan dalam tahapan pengumpulan data. Penelitian ini mempergunakan metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Peneliti melakukan observasi terhadap *media online*, yaitu situs berita *tempo.co* dan *tvonenews.com*; dokumentasi

berupa berita terkait politik dinasti Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 dari situs berita *tempo.co* dan *tvonenews.com*; selanjutnya pengumpulan data dengan teknik studi pustaka awalnya dilakukan menggunakan mesin pencari *google trends* dengan kata kunci “politik dinasti Jokowi” hingga menampilkan puncak pencarian terbanyak pada tanggal 15-28 Oktober 2023 atau lebih tepatnya pada bulan pendaftaran Capres dan Cawapres Indonesia tahun 2024. Selanjutnya peneliti menentukan objek penelitian media *online tempo.co* dan *tvonenews.com* dengan mengacu pada beberapa alasan yakni alasan yang paling mendasar adalah kedua media tersebut merupakan *media online* nasional dan termasuk dalam daftar 10 media *online* populer di Indonesia tahun 2024. Berikutnya penentuan 6 berita pada penelitian ini yakni, pada *tempo.co*, peneliti melakukan pencarian pada *google* dengan mengetik kata kunci ["politik dinasti Jokowi" "*tempo.co*"], sedangkan pada *tvonenews.com*, peneliti melakukan pencarian pada *google* dengan mengetik kata kunci ["politik dinasti Jokowi" "*tvonenews.com*"], berikutnya setelah mengetik kata kunci dibawahnya terdapat beberapa indikator pencarian, untuk kedua *media online* tersebut peneliti sama-sama menambahkan rentang waktu dimulai dari 15 Oktober 2023-28 Oktober 2023 dengan mengurutkannya sesuai relevansi. Dengan urutan relevansi itulah peneliti kemudian mengambil 3 berita teratas dari masing-masing media sehingga berjumlah 6 teks berita yang peneliti jadikan sebagai objek analisis.

Teknik analisis data dengan model *framing* yang dikonsepsikan oleh Robert Mathew Entman (1993) dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat elemen-elemen sebagai alat analisis, yaitu: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab masalah, membuat penilaian moral, dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah (Oktalisa et al., 2023). Selanjutnya teori ekonomi politik media (komodifikasi) yang dikemukakan oleh Vincent Mosco (2009) penelitian ini dilakukan melalui tiga pendekatan: komodifikasi isi, komodifikasi khalayak, dan komodifikasi tenaga kerja.

## PEMBAHASAN

Analisis berita pada situs *media online tempo.co* dan *tvonenews.com* yang dikumpulkan selama 15-28 Oktober 2023 terkait dengan politik dinasti Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2024. Analisis ini dilakukan menggunakan model *framing* Robert Matthew Entman dan komodifikasi dari Vincent Mosco. Berikut Penjabarannya:

### ***Framing* Politik Dinasti Presiden Jokowi Pada Pemilihan Presiden 2024 di *Media Online Tempo.co* dan *Tvonenews.com***

Tabel 3. Rekap *framing tempo.co* dan *tvonenews.com*

Konsep	<i>Tempo.co</i>	<i>Tvonenews.com</i>
<i>Define Problem</i> (pendefinisian masalah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Unjuk rasa memperingati sembilan tahun kepemimpinan Presiden Jokowi diwarnai dengan bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian.</li> <li>Mahasiswa UNS mengenakan pakaian tradisional Jawa yang biasanya dipakai oleh kalangan bangsawan saat melakukan demo di Istana.</li> <li>Keputusan MK menjadi awal bagi Gibran, yang merupakan keponakan Ketua MK Anwar Usman dan anak Presiden Jokowi, untuk mencalonkan diri sebagai wakil Presiden.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gibran belum mengungkapkan posisinya di PDIP.</li> <li>Gibran menarik perhatian publik setelah disebut-sebut sebagai Cawapres dalam Pilpres 2024.</li> <li>Gibran secara resmi diumumkan sebagai bakal Cawapres dari Prabowo Subianto, mengingat ia adalah anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).</li> </ol>
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Politik dinasti Jokowi terlalu instan dan memanfaatkan posisinya yang masih ada.</li> <li>Mahasiswa yang ditangkap saat geruduk istana mengaku dipukul dan dicekik aparat.</li> <li>Mahasiswa UNS Solo kenakan pakaian raja jawa sendiri politik dinasti Jokowi.</li> <li>putusan MK itu dinilai melanggengkan politik dinasti karena Jokowi saat ini masih menjabat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gibran mengaku siap menerima sanksi dari PDIP jika dirinya menerima pinangan menjadi Cawapres Prabowo Subianto.</li> <li>Isu dinasti politik datang beriringan dengan dukungan yang datang terhadap Gibran untuk maju menjadi Cawapres pada perhelatan Pilpres 2024.</li> <li>Putusan MK yang mengizinkan calon yang usianya belum 40 tahun namun sudah berpengalaman di pemerintahan.</li> <li>Ketua MK, Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka.</li> </ol>
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan MK ini semakin memperjelas adanya praktik nepotisme. Pasalnya, Ketua MK Anwar Usman, merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi.</li> <li>Beberapa pimpinan BEM muncul ke depan dan bernegosiasi dengan polisi agar tidak menembakkan <i>water canon</i>. Polisi dengan sigap menahan diri untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gibran mengaku telah melakukan pertemuan dengan sejumlah Ketua Umum Partai Politik (Ketum Parpol) koalisi.</li> <li>Isu dinasti politik akan lekas basi. Namun dinasti politik adalah fenomena yang lazim dalam dunia demokrasi. Hal ini juga berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya. Rakyat adalah hakim tertinggi melalui kotak suara.</li> </ol>

	tidak berbenturan dengan demonstran.	
	3. Presiden Jokowi sudah terang-terangan membangun politik dinasti sebagai jembatan kekuasaan bagi anak-anaknya. Harapannya kekuasaan yang diwariskan khas negara monarki itu tidak terjadi.	
	4. Praktik dinasti politik sudah biasa terjadi.	
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Putusan MK itu dinilai membuka celah bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.</li> <li>Istana mencoba menjembatani tuntutan mahasiswa kepada polisi yang meminta rekan-rekannya dibebaskan.</li> <li>Praktik kekuasaan politik dinasti dapat merugikan masyarakat. Dinasti politik juga berpotensi besar menimbulkan perilaku korupsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gibran mengaku telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani sebelum menyambang sejumlah Ketum Parpol koalisi.</li> <li>Gibran menerima pinangan Partai Golkar yang mengusungnya sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto.</li> <li>Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilihan Presiden 2024. Sementara dua pasang calon lainnya yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah mendaftarkan diri pada terlebih dahulu.</li> </ol>

Sumber: Data olahan peneliti (2024)

**Pada elemen pendefinisian masalah**, *tempo.co* mengaitkan isu politik dinasti dengan bentrokan dalam unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan aparat, serta simbolisme pakaian tradisional yang dikenakan mahasiswa sebagai bentuk kritik terhadap politik dinasti. Serta menekankan pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, untuk maju sebagai calon wakil Presiden, dengan menyoroti keterkaitan keluarga Ketua MK. *Tvonenews.com* fokus pada perkembangan politik terkait Gibran Rakabuming Raka, termasuk ketidakpastian statusnya di PDIP dan sorotan publik mengenai potensinya sebagai calon wakil Presiden. Dan menekankan pada isu dinasti politik yang muncul setelah Gibran dideklarasikan sebagai Cawapres oleh Prabowo Subianto, serta keterkaitan keluarga antara Gibran, Presiden Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan yang melekat sering kali disalahgunakan serta tidak jarang jabatan dan fasilitas yang ada dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, misal kampanye pemenangan calon yang memiliki hubungan

baik sehingga dalam hal ini negara dan masyarakat sangat dirugikan. Selain itu penyalahgunaan jabatan dapat terjadi dengan menekan pejabat struktural dibawahnya secara massif dan sistematis (Dairani, 2022).

**Pada elemen memperkirakan sumber masalah,** *tempo.co* menilai bahwa politik dinasti Jokowi adalah bentuk nepotisme yang memanfaatkan posisi kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Prayitno (2021) menyatakan bahwa dinasti politik bila terus dipertahankan akan menutup ruang gerak warganegara yang lain untuk turut serta dalam kontestasi politik karena tidak adanya dukungan dan kekuatan dari keluarga yang sedang menjabat. Sehingga jabatan-jabatan publik dan jabatan strategis hanya bisa diisi oleh orang-orang yang punya hubungan dengan penguasa atau keluarga yang sedang menjabat. Sebab, pada realitanya masyarakat tidak berani dan percaya diri bila berlawanan dengan calon yang berangkat dari lingkungan dinasti politik. Serta juga menyoroti perlakuan kasar aparat terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa dan penggunaan pakaian tradisional sebagai kritik terhadap praktik politik dinasti Presiden Jokowi. *Tvonenews.com* menekankan kesiapan Gibran untuk menerima sanksi dari PDIP dan menjelaskan isu dinasti politik dalam konteks dukungan yang diterimanya untuk pencalonan. Juga mengaitkan isu dinasti dengan putusan MK yang memungkinkan calon muda dengan pengalaman pemerintahan untuk maju, serta hubungan keluarga dengan Ketua Mahkamah Konstitusi.

**Pada elemen membuat keputusan moral,** *tempo.co* mengkritik praktik nepotisme dan politik dinasti dengan menyebut keputusan MK sebagai langkah yang memperjelas adanya praktik nepotisme karena keterkaitan keluarga antara Ketua MK dan Presiden Jokowi. Serta menyebutkan reaksi dari pihak-pihak yang menilai bahwa politik dinasti Jokowi adalah bentuk kekuasaan yang tidak etis dan mengharapkan perubahan.

Menurut Gunanto (2020) dalam negara demokrasi, politik dinasti telah muncul sejak lama yang menimbulkan kekhawatiran adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik sehingga dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik, yang disebut kekuasaan melahirkan kekuatan.

*Tvonenews.com* menampilkan pernyataan yang menganggap isu dinasti politik sebagai fenomena umum yang akan segera basi, dan menegaskan bahwa keputusan ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Menurut Dairani (2022) kedaulatan rakyat merupakan satu dari sekian banyak ciri negara demokrasi, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah harus bermuara baik demi kepentingan rakyat. Serta menyebutkan langkah-langkah yang diambil oleh Gibran dalam proses pencalonannya, termasuk pertemuan dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol).

**Pada elemen menekankan penyelesaian,** *tempo.co* menekankan bahwa putusan MK membuka peluang untuk Gibran sebagai Cawapres dan mengkritik praktik politik dinasti yang dapat merugikan masyarakat dan

berpotensi menyebabkan korupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian Dairani (2022) yang menyatakan keberadaan dan keberlangsungan dinasti politik dalam suatu negara demokrasi tentu tidak baik-baik saja sebab hal tersebut berpotensi merusak demokrasi, memperlambat birokrasi serta memperbesar peluang terjadinya praktik kotor yaitu korupsi. Serta fokus pada upaya Istana untuk menjembatani tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari penyelesaian konflik. *Tvonenews.com* fokus pada perkembangan politik Gibran, termasuk pertemuan dengan pimpinan partai dan rencana pendaftaran sebagai calon wakil Presiden. Serta menyajikan informasi tentang proses pendaftaran calon lainnya dalam Pilpres 2024.

Oleh karena itu, secara keseluruhan dalam konteks pemberitaan isu politik dinasti Presiden Jokowi pada pilpres 2024 ditemukan *framing media online tempo.co* cenderung menyoroti dampak sosial dan etika dari politik dinasti, dengan penekanan pada kritik terhadap nepotisme dan dampak negatif yang mungkin timbul. Berita ini disajikan dalam konteks konflik sosial dan ketidakadilan. *Media online tvonenews.com* membingkai berita pada aspek politik praktis dan proses pencalonan Gibran, dengan fokus pada detail dan langkah-langkah politik yang diambil, serta pandangan bahwa isu dinasti politik adalah fenomena yang lazim dan tidak perlu terlalu dipermasalahkan. *Tvonenews.com* terlihat tidak berimbang dan berpihak pada salah satu pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tertentu (Pangeran Siagian & Mara Untung Ritonga, 2024).

### **Komodifikasi Politik Dinasti Presiden Jokowi Pada Pemilihan Presiden 2024 di *Media Online Tempo.co* dan *Tvonenews.com***

Tabel 4. Rekap komodifikasi *tempo.co* dan *tvonenews.com*

Konsep	<i>Tempo.co</i>	<i>Tvonenews.com</i>
<i>Komodifikasi Isi (commodification of content)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isu sensasional dan kontroversial ditemukan, seperti politik dinasti dan keputusan hukum MK.</li> <li>2. Menyoroti dampak negatif keputusan MK terhadap demokrasi untuk menarik perhatian pembaca.</li> <li>3. Klaim bahwa keputusan MK melanggengkan politik dinasti.</li> <li>4. Penyajian berita dengan fokus pada reaksi emosional, seperti kekhawatiran tentang keadilan dan transparansi.</li> <li>5. Memanfaatkan tokoh publik penting untuk menarik minat pembaca.</li> <li>6. Berita tentang demonstrasi mahasiswa mencerminkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isu sensasional tentang potensi sanksi PDIP terhadap Gibran jika menerima tawaran Prabowo Subianto menarik perhatian publik, memanfaatkan status Gibran sebagai figur publik.</li> <li>2. Proses mengubah pesan menjadi produk yang dapat dipasarkan terkait potensi sanksi PDIP terhadap Gibran Rakabuming Raka.</li> <li>3. Meningkatkan keterlibatan pembaca dan pendapatan iklan dengan menekankan potensi sanksi tanpa konteks yang cukup, mengaburkan fakta.</li> </ol>

	ketidakpuasan terhadap pemerintahan.	4. Memusatkan perhatian pada Gibran, putra Presiden Jokowi, yang menambah bobot isu dinasti politik serta tanggapannya terhadap isu politik dinasti.
7.	Aksi mahasiswa menggunakan simbolisme (pakaian tradisional) untuk menyampaikan pesan politik dan sindiran.	5. Penyajian perspektif langsung dari Gibran membuat konten lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan audiens, mencerminkan strategi <i>marketing</i> partai politik untuk memenangkan pemilihan.
8.	Tuntutan mahasiswa mengangkat isu-isu demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia yang menarik perhatian.	6. Putusan MK yang mengizinkan calon di bawah 40 tahun berpengalaman memperkuat isu dinasti politik dalam konteks Pilpres 2024.
9.	Penggunaan judul <i>clickbait</i> sebagai strategi <i>media online</i> untuk menarik perhatian khalayak.	7. Menyajikan tanggapan tokoh publik menambah nilai berita dengan pandangan dari otoritas terkemuka.
10.	Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon Presiden dan wakil Presiden menjadi konten berita menarik.	
11.	Konten berfokus pada politik dinasti, memanfaatkan ketenaran dan posisi politik Jokowi.	
12.	Pendapat pengamat hukum disertakan untuk memberikan kredibilitas dan memperkuat narasi dampak keputusan MK.	
13.	Topik yang memicu reaksi emosional dan perdebatan publik digunakan untuk meningkatkan keterlibatan pembaca.	
Komodifikasi Khalayak (audience commodity)	1. Legitimasi MK sebagai lembaga yudikatif dipertanyakan, berpotensi menurunkan kepercayaan publik. 2. Kekhawatiran terhadap persepsi negatif proses demokrasi, khususnya keterlibatan keluarga dalam politik. 3. Meningkatkan kesadaran publik tentang isu politik dinasti dan dampaknya terhadap demokrasi. 4. Mendorong diskusi tentang transparansi lembaga hukum, termasuk MK. 5. Berita menarik perhatian publik berpotensi meningkatkan pendapatan iklan media.	1. Menyoroti isu sensasional dan relevan dalam konteks politik, memanfaatkan ketertarikan publik terhadap dinamika politik menjelang Pilpres 2024. 2. Isu sensasional mengenai potensi sanksi terhadap Gibran yang dapat memengaruhi Pilpres 2024. 3. Menciptakan narasi emosional dan kontroversial untuk memicu reaksi pembaca. 4. Pertemuan Gibran dengan ketua umum partai politik menunjukkan upaya membangun dukungan publik.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Media meliput aksi mahasiswa sebagai peristiwa penting yang menarik perhatian publik.</li> <li>7. Tindakan mahasiswa dan respons aparat menjadi berita yang meningkatkan ketertarikan masyarakat.</li> <li>8. Isu kekerasan aparat dan sindiran politik dinasti meningkatkan kesadaran serta diskusi publik.</li> <li>9. Publik sebagai konsumen berita terpengaruh oleh narasi politik, dukungan terhadap calon dimanfaatkan untuk legitimasi.</li> <li>10. Media menyajikan informasi untuk menarik perhatian pembaca yang peduli dengan isu politik dinasti.</li> <li>11. Meningkatkan kesadaran publik mengenai dinamika politik dan hukum, mendorong keterlibatan masyarakat.</li> <li>12. Konten sensasional berpotensi meningkatkan pendapatan iklan media, mendukung keberlangsungan operasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Fokus pada tanggapan Gibran menciptakan ketertarikan dan mendorong pembaca untuk terlibat dalam diskusi mengenai politik dinasti.</li> <li>6. Dukungan terhadap Gibran diperkirakan akan datang dari generasi milenial dan pemilih yang puas dengan Jokowi.</li> <li>7. Memberikan informasi dan analisis relevan dari seorang ahli, meningkatkan pemahaman pembaca tentang dinamika politik.</li> <li>8. Mendorong pembaca untuk terlibat aktif, berdiskusi, dan mencari informasi lebih lanjut, meningkatkan interaksi dengan media.</li> <li>9. Menggunakan isu kontroversial dan komentar ahli untuk menarik perhatian, berpotensi meningkatkan trafik dan pendapatan iklan.</li> </ol>
<i>Komodifikasi Tenaga Kerja (commodification of labor)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan MK memengaruhi karir politik individu muda tanpa dukungan kekuatan politik yang ada.</li> <li>2. Potensi penguatan jaringan keluarga dalam politik mengurangi kesempatan kandidat lain bersaing adil.</li> <li>3. Jurnalis dituntut mengemas berita secara sensasional untuk menarik perhatian pembaca.</li> <li>4. Perusahaan media menggunakan strategi menarik seperti judul sensasional atau melebih-lebihkan.</li> <li>5. Penekanan pada elemen dramatis mencerminkan komodifikasi konten berita untuk keuntungan ekonomi.</li> <li>6. Penangkapan mahasiswa oleh aparat mencerminkan dinamika kekuasaan dalam konteks tenaga kerja dan aktivisme.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian Gibran memanfaatkan statusnya sebagai putra Presiden Jokowi untuk meningkatkan <i>engagement</i> dan menciptakan narasi emosional yang mempengaruhi reputasi dan kualitas informasi.</li> <li>2. Dedikasi Jurnalis kepada perusahaan yang memberi penghasilan, dengan kebanggaan berkontribusi dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas.</li> <li>3. Gibran berinteraksi dengan ketua umum partai politik untuk membangun koalisi, menunjukkan dinamika politik dan strategi dalam pemilihan.</li> </ol>

- 
- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Elemen sensasional menarik lebih banyak perhatian, berdampak pada trafik situs <i>web</i> dan pendapatan iklan.</li> <li>8. Jurnalis terdorong mengangkat isu menarik dan kontroversial untuk memenuhi target <i>engagement</i>.</li> <li>9. Fokus pada kekerasan dan simbolisme baju adat meningkatkan daya tarik berita.</li> <li>10. Pekerja media mengalami tekanan untuk menghasilkan konten menarik sesuai kepentingan pemilik media, menciptakan kondisi kerja tidak menguntungkan.</li> <li>11. Kondisi kerja yang menuntut, termasuk tenggat waktu ketat dan tugas ganda dengan upah rendah, berkontribusi pada komodifikasi tenaga kerja di industri media.</li> <li>12. Inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi meningkatkan beban kerja jurnalis tanpa kompensasi memadai.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jurnalis melakukan riset dan wawancara untuk menyajikan berita yang menarik, mencerminkan komodifikasi tenaga kerja dalam produksi berita.</li> <li>5. Pekerjaan jurnalis dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menghasilkan konten yang menarik dan viral.</li> <li>6. Dinasti politik dianggap sebagai fenomena umum dalam demokrasi, termasuk dalam konteks pemilihan umum.</li> <li>7. Pekerja media mengumpulkan informasi dan menyusun berita untuk menarik pembaca dan meningkatkan trafik.</li> <li>8. Tenaga kerja media dikomersialkan melalui konten berita yang dihasilkan, mendatangkan pendapatan bagi media.</li> <li>9. Jurnalis sering menghadapi tekanan untuk memenuhi tenggat waktu dan potensi eksploitasi dalam industri media.</li> </ol> |
|--|---|
- 

Sumber: Data olahan peneliti (2024)

Komodifikasi berkaitan dengan suatu proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya untuk selanjutnya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya dipasar. Sementara proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar dalam media massa selalu melibatkan pekerja media, pasar, khalayak, dan negara jika masing-masing diantaranya mempunyai kepentingan (Mosco, 2019).

**Pada komodifikasi isi**, *tempo.co* memproduksi konten berita dengan fokus pada isu sensasional dan kontroversial untuk menarik perhatian publik dan meningkatkan pendapatan iklan. Tampak pada berita tentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait politik dinasti yang dirancang untuk menimbulkan reaksi emosional. Media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kandidat, menekankan pentingnya transparansi, keakuratan informasi dan literasi digital masyarakat (Romadonna et al., 2024).

*Tvonenews.com* mengubah berita menjadi barang jualan dengan menekankan elemen sensasional untuk menarik pembaca dan meningkatkan trafik. Tampak pada berita mengenai potensi sanksi PDIP terhadap Gibran Rakabuming Raka. Konsep sensasionalisme merupakan tindakan yang disengaja dari jurnalis atau kebijakan editorial sebuah media, tujuannya adalah untuk menarik, merangsang, membangkitkan, dan memprovokasi respons emosional (Garst, Robert E., 1982).

**Pada komodifikasi khalayak**, *tempo.co* memanfaatkan audiens sebagai komoditas yang dijual kepada pengiklan. Dengan menekankan isu-isu kontroversial, mereka meningkatkan keterlibatan dan trafik yang berdampak pada pendapatan iklan. Sedangkan, *tvonenews.com* memanfaatkan audiens untuk meningkatkan pendapatan iklan melalui konten yang memicu diskusi dan keterlibatan tinggi. Konten yang sensasional membantu dalam menarik perhatian dan meningkatkan trafik situs.

Dalam industri media dan komunikasi, khalayak melakukan pekerjaan dengan menghabiskan waktu menonton media komersial (dan iklan yang endemik di dalamnya) dan bahwa pekerjaan ini adalah bentuk kerja yang menghasilkan komoditas berharga, perhatian khalayak, yang dapat dijual kepada pengiklan (Miller & Hogg, 2023).

**Pada komodifikasi tenaga kerja**, menurut Widiastuti (2022) tenaga kerja adalah semua orang yang dapat melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk kebutuhan tenaga kerja sendiri maupun masyarakat. Jurnalis di *tempo.co* menghadapi tekanan untuk memproduksi berita yang sensasional dan kontroversial, yang dapat menyebabkan kelelahan. Hal ini dipengaruhi oleh target engagement yang tinggi. Sedangkan, Jurnalis di *tvonenews.com* mungkin menghadapi tekanan untuk memproduksi berita yang cepat dan menarik, berpotensi mengorbankan kualitas dan menyebabkan kelelahan.

Menurut Pratopo (2018) komodifikasi pekerja media atau wartawan, yang menempatkan mereka sebagai alat produksi guna memaksimalkan keuntungan. Wartawan dituntut untuk bisa menjalankan berbagai tugas sekaligus (multitasking). Wartawan harus meningkatkan kinerja agar produk digital makin beragam dan banyak sehingga pendapatan perusahaan terus naik. Adapun sikap terhadap politik dinasti Jokowi, *tempo.co* cenderung kritis terhadap politik dinasti Jokowi dan keputusan MK yang mendukungnya. Mereka menyoroti dampak negatif dari politik dinasti terhadap demokrasi dan sering mendukung transparansi dan reformasi. Sedangkan *tvonenews.com* cenderung menampilkan isu-isu politik dinasti Jokowi dengan pendekatan yang mungkin mendukung atau menjelaskan posisi politik dinasti. Mereka seringkali mengangkat isu sensasional yang terkait dengan Jokowi dan politik dinasti yang tampak tidak terlalu kritis.

Menurut Nilam Cahyaningtyas dan Arif (2018) dinasti dapat dilihat dari sisi positifnya, serta dapat menguatkan putusan MK Nomor 33/PUU-

XIII/2015 yang menyatakan bahwa petahana atau seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan petahana boleh mengajukan diri sebagai calon pemimpin. Secara hukum dinasti politik adalah legal hal ini dipertegas dengan adanya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 karena dianggap bertentangan dengan UUD. Upaya konstitusional yang dapat dilakukan guna mencegah dinasti politik ada beberapa aspek. Pertama, masyarakat untuk bersama-sama tidak memilih calon yang berangkat dari dinasti politik; kedua, partai politik untuk tidak menunjuk calon yang memiliki hubungan dengan penguasa; dan yang ketiga, pada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk memberikan sanksi tegas bila ditemukan calon yang berkampanye dengan memanfaatkan jabatan keluarganya dan fasilitas negara (Dairani, 2022). Meskipun tampak banyak perbedaan terlebih pada pendekatan editorial yang berbeda, namun juga terdapat persamaan diantara kedua media tersebut yakni sama-sama menggunakan komodifikasi konten, audiens, dan tenaga kerja sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan dan keterlibatan pembaca.

Dalam kamus ekonomi, istilah ekonomi politik (*political economy*) disebutkan bahwa "*political economy is the science of wealth" and "deals with efforts made by man [sic.] to supply wants and satisfy desires"*. Definsi tersebut dalam pandangan penulis menekankan bahwa ekonomi politik sangat terkait dengan usaha dan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yang tentu saja hal ini sangat terkait konsep ideologi dan kekuasaan (Sibaweh, 2022).

Komodifikasi dalam perspektif ekonomi politik media dapat diartikan sebagai suatu media atau perangkat yang digunakan oleh seorang jurnalis atau tenaga kerja untuk memilih perangkat yang akan digunakan untuk mengemas konten/isi pemberitaan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi (menarik perhatian khalayak) terhadap suatu objek (dapat berupa politik, sosial, budaya, dan sebagainya) dalam konteks penelitian ini objeknya adalah isu dinasti politik.

*Tempo.co* menggunakan teknologi dan strategi canggih dalam jurnalisme mereka, berfokus pada detail mendalam dan analisis kritis dalam pemberitaannya. *Tempo.co* menarik audiens yang tertarik pada analisis mendalam dan informasi yang komprehensif, yang berujung pada keterlibatan yang lebih mendalam sehingga meningkatkan pendapatan iklan dari audiens yang serius. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Trisnawati (2022) yang menyatakan bahwa *tempo.co* sebagai salah satu konten berita yang menarik dan cukup informatif. *Tempo.co* juga menggunakan pendekatan yang mendalam dan analitis dalam komodifikasi konten serta menangkap isu politik dinasti dengan detail dan kedalaman yang tinggi, seperti politik dinasti Jokowi dalam konteks yang lebih luas.

*Tvonenews.com* menyajikan berita dengan fokus pada aspek sensasional dan relevansi saat ini dalam komodifikasi konten. Mereka fokus pada berita yang menarik perhatian dan relevan secara instan, seperti politik

dinasti Jokowi dengan cara yang cepat dan sensasional. Ekonomi mereka berfokus pada mendapatkan trafik yang tinggi dan pendapatan iklan dengan cara yang praktis dan efisien. *tvonenews.com* menarik audiens dengan berita sensasional dan relevan yang mudah diakses, menghasilkan keterlibatan cepat sehingga meningkatkan pendapatan iklan yang lebih besar melalui trafik yang tinggi dan jangkauan yang luas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuanda Anshari Dalimunthe (2023) yang menyatakan bahwa terdapat aspek sosial dan politik yang membuat masyarakat terus penasaran sehingga bisa menaikkan rating dan share terhadap TVOne.

Tabel 5. Perbandingan *framing* dan komodifikasi politik dinasti Presiden Jokowi pada pemilihan Presiden 2024 di media *online tempo.co* dan *tvonenews.com*

Konsep	<i>Tempo.co</i>	<i>Tvonenews.com</i>
<i>Framing</i>	<i>Tempo.co</i> menyoroti dampak sosial dan etika dari politik dinasti, dengan penekanan pada kritik terhadap nepotisme dan dampak negatif yang mungkin timbul bagi masyarakat.	<i>Tvonenews.com</i> berfokus pada aspek politik praktis, mencakup langkah-langkah pencalonan Gibran dan memberikan kesan bahwa isu dinasti politik adalah hal yang umum dan tidak perlu dipermasalahkan.
Komodifikasi	<i>Tempo.co</i> menekankan pada kualitas konten dan analisis yang mendalam serta kritis.	<i>Tvonenews.com</i> fokus pada berita cepat dan sensasional untuk menarik perhatian secara instan.

Sumber: Data olahan peneliti (2024)

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Framing* pemberitaan politik dinasti Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 pada *media online tempo.co* dan *tvonenews.com* berbeda signifikan dalam mengemas serta melaporkan berita politik dinasti Jokowi pada Pilpres 2024. *Tempo.co* menyoroti dampak sosial dan etika dari politik dinasti, dengan penekanan pada kritik terhadap nepotisme dan dampak negatif yang mungkin timbul bagi masyarakat dalam demokrasi. Di sisi lain, pembingkaihan *tvonenews.com* berfokus pada aspek politik praktis, mencakup langkah-langkah pencalonan Gibran dan memberikan kesan bahwa isu dinasti politik adalah hal yang umum dan tidak perlu dipermasalahkan. Pada elemen pendefinisian masalah, *tempo.co* mengaitkan isu politik dinasti dengan bentrokan dalam unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan aparat, serta simbolisme pakaian tradisional yang dikenakan mahasiswa sebagai bentuk kritik terhadap politik dinasti. Sedangkan *tvonenews.com* menekankan pada isu dinasti politik yang muncul setelah Gibran dideklarasikan sebagai Cawapres oleh Prabowo Subianto, serta keterkaitan keluarga antara Gibran, Presiden Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada elemen memperkirakan sumber masalah, *tempo.co* menilai bahwa politik dinasti

Jokowi adalah bentuk nepotisme yang memanfaatkan posisi kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Sedangkan *tvonenews.com* mengaitkan isu dinasti dengan putusan MK yang memungkinkan calon muda dengan pengalaman pemerintahan untuk maju, serta hubungan keluarga antara Gibran dengan Ketua MK. Pada elemen membuat keputusan moral, *tempo.co* mengkritik praktik nepotisme dan politik dinasti dengan menyebut keputusan MK sebagai langkah yang memperjelas adanya praktik nepotisme karena keterkaitan keluarga antara Ketua MK dan Presiden Jokowi. Sedangkan *tvonenews.com* menampilkan pernyataan yang menganggap isu dinasti politik sebagai fenomena umum yang akan segera basi, dan menegaskan bahwa keputusan ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Pada elemen menekankan penyelesaian, *tempo.co* menekankan bahwa putusan MK membuka peluang untuk Gibran sebagai Cawapres dan mengkritik praktik politik dinasti yang dapat merugikan masyarakat dan berpotensi menyebabkan korupsi. Sedangkan *tvonenews.com* fokus pada perkembangan politik Gibran, termasuk pertemuan dengan pimpinan partai dan rencana pendaftaran sebagai calon wakil Presiden.

Komodifikasi *media online tempo.co* dan *tvonenews.com* berbeda signifikan, *tempo.co* menekankan pada kualitas konten dan analisis yang mendalam serta kritis. Sedangkan *tvonenews.com* fokus pada berita cepat dan sensasional untuk menarik perhatian secara instan. Pada komodifikasi isi, *tempo.co* memproduksi konten berita dengan fokus pada isu sensasional dan kontroversial untuk menarik perhatian publik dan meningkatkan pendapatan iklan. Sedangkan *tvonenews.com* mengubah berita menjadi barang jualan dengan menekankan elemen sensasional untuk menarik pembaca dan meningkatkan trafik. Pada komodifikasi khalayak, *tempo.co* memanfaatkan audiens sebagai komoditas yang dijual kepada pengiklan. Sedangkan *tvonenews.com* memanfaatkan audiens untuk meningkatkan pendapatan iklan melalui konten yang memicu diskusi dan keterlibatan tinggi. Pada komodifikasi tenaga kerja, jurnalis di *tempo.co* menghadapi tekanan untuk memproduksi berita yang sensasional dan kontroversial, yang dapat menyebabkan kelelahan. Sedangkan, jurnalis di *tvonenews.com* menghadapi tekanan untuk memproduksi berita yang cepat dan menarik, berpotensi mengorbankan kualitas dan menyebabkan kelelahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3). <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group.
- Dairani, D. (2022). Upaya Konstitusional Dalam Memutus Mata Rantai Dinasti Politik Pada Pemilukada Serentak Tahun 2024. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(2), 199–210. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.199-210>

- Dalimunthe, Y. A. (2023). Analisis Komodifikasi Isi Media (Konten) Berita “Ketika Presiden ‘Digelitik’ Kritik” Pada Program Catatan Demokrasi TvOne. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 305. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.305-312>
- Della Trisnawati, & Supriadi, Y. (2022). Resepsi Khalayak Mengenai Berita Di Media Sosial Instagram Tempo.Co. *Bandung Conference Series: Journalism*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsj.v2i2.4579>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2020). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. PT LKiS Printing Cemerlang.
- Garst, Robert E., and T. M. B. (1982). *Headlines and Deadlines: A manual for copy editors*. Columbia University Press.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Komala, L. (2009). *Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses dan Konteks*. Widya Padjadjaran.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Melelo, S. S. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. *Policy Studies*, 72, 0\_1-61,63-67,69-74,76.
- Miller, V., & Hogg, E. (2023). ‘If you press this, I’ll pay’: MrBeast, YouTube, and the mobilisation of the audience commodity in the name of charity. *Convergence*, 29(4), 997–1014. <https://doi.org/10.1177/13548565231161810>
- Mosco, V. (2009). The political economy of communication. In *The Political Economy of Communication*. <https://doi.org/10.4135/9781446279946>
- Mosco, V. (2019). *The Political Economy of Communication*.
- Mulyana, D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nilam Cahyaningtyas, & Arif, M. A. (2018). Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri : Pertukaran Sosial Tim Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri Dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang. In *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA* (Vol. 6, Issue 1).
- Oktalisa, N. E., Ar, M., Riauan, I., & Nasution, B. (2023). Analysis of Government Policy Framing in the Implementation of Pekanbaru City Flight Attendants at Pekanbaru . go . id and Cakaplah . com June 2023 Edition. *AICCON*, 1, 565–579.
- Pangeran Siagian, & Mara Untung Ritonga. (2024). Analisis Framing Dalam Pemberitaan Politik Di tvonenews.com. *Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(2), 126–139. <https://doi.org/10.62383/filosofi.v1i2.96>
- Pratopo, W. M. (2018). Komodifikasi Wartawan di Era Konvergensi: Studi Kasus Tempo. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(2), 129–138. <https://doi.org/10.7454/jki.v6i2.8715>
- Prayitno, I. H., Ekawati, D., & Susanto, S. (2021). Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020). *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah*

- Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 68. <https://doi.org/10.32493/skd.v8i1.y2021.11686>
- Putri, E. L. (2022). *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Suap Ditjen Pajak Pada Media Online Tempo . Co dan Suara . Com*. 6, 3085–3090.
- Romadonna, R., Amalia, R., Jauhari, J., & Zuhro, D. F. (2024). Dinamika Kampanye Politik Di Era Digital: Analisis Strategi Gimik Media Sosial Prabowo Gibran Pemilu 2024. *Jurnal Pemasaran Bisnis*, 6(2), 134–148.
- Romli, K. (2016). *Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). *Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Sibaweh, N. (2022). Tenaga Kerja dalam Kajian Ekonomi Politik Media (Tinjauan atas Pemikiran Vincent Mosco). *PROPAGANDA*, 2(2), 135–146. <https://doi.org/10.37010/prop.v2i2.762>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tomsa, D. (2018). Parties and party politics in the post-reformasi era. In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. <https://doi.org/10.4324/9781315628837>
- Widiastuti, N. (2022). Dampak Penggunaan Ekonomi Digital Terhadap Biaya Tenaga Kerja Pada Umkm Industri Bakpia Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 9(2), 39–56. <https://doi.org/10.32477/jrm.v9i2.449>